

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 15 Okt 2025**Published : 24 Okt 2025*

---

## **STRATEGI PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA CIBODAS KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Dewi Agustina Nurdianti<sup>1</sup>Rira Nuradhawati<sup>2</sup>Dadang Sufianto<sup>3</sup>*1,2,3) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unjani*

Email Korespondensi :

### ***Abstract***

*The implementation of good governance principles in the management of village funds is an essential aspect of ensuring transparency, accountability, and participatory development at the local level. This study aims to analyze the optimization of good governance in village fund management through the Strategic Triangle approach by Mark Moore, encompassing three dimensions: public value, operational capacity, and legitimacy and support. Using a qualitative descriptive method, data were collected through interviews, observation, and documentation at Cibodas Village, Lembang Subdistrict, West Bandung Regency. The results reveal that the realization of public value is reflected in the enhancement of community welfare through transparent budgeting and development projects responsive to public needs. However, challenges remain in the consistency of information disclosure and community involvement. The operational capacity dimension indicates limited technical and human resources in planning, implementing, and monitoring projects. Meanwhile, legitimacy and support are shaped by the synergy between village government, local institutions, and the community, though still constrained by bureaucratic rigidity and uneven participation. The findings contribute to both theory and practice by emphasizing the necessity of strengthening institutional capacity, participatory mechanisms, and inter-organizational collaboration to ensure sustainable governance of village funds.*

***Keywords: good governance, village fund management, strategic triangle, public value, Cibodas Village***

### **PENDAHULUAN**

Fenomena tata kelola pemerintahan desa di Indonesia menjadi perhatian penting seiring dengan meningkatnya alokasi Dana Desa (DD) sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana Desa merupakan instrumen utama pemerintah dalam mempercepat pembangunan dan mengurangi kesenjangan sosial

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 15 Okt 2025**Published : 24 Okt 2025*

---

ekonomi antarwilayah. Namun, kompleksitas pengelolaan Dana Desa menuntut penerapan prinsip good governance agar penggunaannya efektif, efisien, dan akuntabel. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan Dana Desa tidak hanya bergantung pada jumlah anggaran, tetapi terutama pada kemampuan pemerintah desa dalam mengelola kebijakan secara transparan, partisipatif, dan berorientasi pada hasil.

Desa Cibodas di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu desa dengan potensi ekonomi dan pariwisata yang tinggi, namun masih menghadapi tantangan dalam tata kelola keuangan publik. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung Barat tahun 2024, Dana Desa yang dialokasikan untuk Cibodas mencapai lebih dari Rp1,2 miliar per tahun. Anggaran tersebut digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan pembangunan fisik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan penguatan kelembagaan. Meskipun demikian, berbagai laporan audit dan evaluasi kinerja mengindikasikan bahwa praktik pelaporan dan mekanisme partisipasi masyarakat belum berjalan optimal, sehingga efektivitas pengelolaan dana belum mencapai tingkat ideal.

Pentingnya good governance dalam pengelolaan Dana Desa terletak pada kemampuannya menciptakan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut menuntut adanya peran aktif aparatur desa, kapasitas kelembagaan yang memadai, serta dukungan masyarakat sebagai penerima manfaat. Dalam konteks Desa Cibodas, praktik good governance menjadi kunci utama untuk menghindari penyimpangan anggaran dan memastikan bahwa setiap rupiah Dana Desa benar-benar memberi dampak terhadap kesejahteraan warga.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Indonesia sering dihadapkan pada persoalan klasik seperti kurangnya keterampilan administrasi, lemahnya sistem pengawasan internal, dan rendahnya partisipasi

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 15 Okt 2025**Published : 24 Okt 2025*

---

masyarakat (Suharyanto, 2021; Kurniawan & Rachmawati, 2022). Permasalahan ini juga tampak di Cibodas, di mana transparansi anggaran belum sepenuhnya terbuka kepada publik, dan koordinasi antar lembaga desa masih bersifat sektoral. Untuk itu, analisis yang komprehensif diperlukan agar strategi penerapan good governance di tingkat desa dapat dioptimalkan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi penerapan good governance dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Cibodas Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam strategi penerapan good governance melalui dimensi *public value*, *operational capacity*, dan *legitimacy and support* yang berimplikasi terhadap efektivitas pembangunan desa.

Urgensi penelitian ini tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga praktis. Dari sisi teoritik, penelitian ini memperkaya kajian tata kelola pemerintahan desa berbasis strategic management dengan menekankan interaksi antara nilai publik, kapasitas, dan legitimasi. Dari sisi praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dan desa untuk memperkuat sistem tata kelola Dana Desa yang lebih transparan, efisien, dan berorientasi hasil. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji proses administratif pengelolaan Dana Desa, tetapi juga menyoroti faktor-faktor strategis yang menentukan keberlanjutan tata kelola desa. Penerapan prinsip good governance menjadi pondasi bagi Desa Cibodas dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan partisipatif sesuai dengan amanat pembangunan nasional dan semangat desentralisasi.

### *Kerangka Teori*

Penerapan *good governance* pada tataran pemerintahan desa merupakan salah satu pilar utama dalam membangun tata kelola publik yang efektif dan berkeadilan. Tata kelola yang baik tidak hanya menekankan aspek kepatuhan terhadap peraturan perundangan, tetapi juga mengutamakan penciptaan nilai publik (*public value*) yang

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 15 Okt 2025**Published : 24 Okt 2025*

---

nyata bagi masyarakat. Dalam konteks desentralisasi di Indonesia, keberhasilan desa mengelola Dana Desa secara akuntabel menjadi ukuran konkret dari implementasi *good governance* itu sendiri. Untuk menganalisis strategi penerapan *good governance* secara komprehensif, penelitian ini menggunakan kerangka *Strategic Triangle* yang dikembangkan oleh Mark Moore (1995).

Moore menegaskan bahwa dalam menghadapi dinamika sosial, ekonomi, dan politik, aparatur publik harus memiliki visi strategis yang mampu menyeimbangkan antara kepentingan masyarakat, kemampuan organisasi, dan dukungan eksternal. Dengan demikian, teori *Strategic Triangle* menjadi alat analisis yang relevan untuk menilai efektivitas implementasi *good governance* pada level mikro pemerintahan, termasuk pengelolaan Dana Desa. Berikut uraian dari ketiga dimensi utama teori ini.

#### 1) Nilai Publik (*Public Value*)

Konsep *public value* berfokus pada sejauh mana aktivitas pemerintahan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurut Moore (1995), *public value* tidak dapat diukur hanya dari efisiensi birokrasi, tetapi juga dari persepsi masyarakat terhadap manfaat kebijakan publik yang dijalankan. Moore menambahkan bahwa penciptaan *public value* memerlukan pemimpin publik yang mampu memahami aspirasi warga dan menyeimbangkannya dengan sumber daya yang tersedia. Dalam konteks Desa Cibodas, dimensi ini menjadi tolak ukur bagi keberhasilan perangkat desa dalam mengelola Dana Desa untuk tujuan kemaslahatan bersama.

#### 2) Kapasitas Operasional (*Operational Capacity*)

Dimensi kedua adalah *operational capacity*, yaitu kemampuan organisasi publik untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif melalui struktur kelembagaan, sumber daya manusia, dan sistem manajerial yang memadai. Menurut Moore (1995), kapasitas operasional mencakup ketersediaan sarana-prasarana, kompetensi aparatur, mekanisme koordinasi, serta kemampuan teknis dalam melaksanakan program yang telah direncanakan. Dalam pengelolaan

*Received : 22 Sept 2025*

*Accepted : 15 Okt 2025*

*Published : 24 Okt 2025*

---

Dana Desa, kapasitas operasional berperan penting dalam menentukan efektivitas kebijakan. Aparatur desa harus memiliki kemampuan administratif, keuangan, dan teknis agar setiap tahapan pengelolaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan, dapat berjalan dengan baik. Kapasitas ini juga mencakup kemampuan desa dalam memanfaatkan teknologi digital, mengelola data keuangan, serta mengefisienkan proses monitoring dan evaluasi.

### 3) Legitimasi dan Dukungan (*Legitimacy and Support*)

Dimensi ketiga dalam *Strategic Triangle* adalah *legitimacy and support*, yang berhubungan dengan tingkat kepercayaan dan dukungan dari masyarakat serta pihak eksternal terhadap kebijakan publik yang dijalankan. Menurut Moore (1995), legitimasi dan dukungan menjadi prasyarat bagi keberlanjutan kebijakan, karena tanpa penerimaan publik, setiap program berisiko menghadapi resistensi sosial atau rendahnya partisipasi masyarakat. Dalam konteks pemerintahan desa, legitimasi dapat dibangun melalui transparansi informasi, pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, serta komunikasi publik yang terbuka dan akuntabel.

Ketiga dimensi *Strategic Triangle* ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling berinteraksi dan membentuk keseimbangan strategis. Penciptaan nilai publik harus ditopang oleh kapasitas operasional yang kuat dan legitimasi sosial yang luas. Begitu pula, kapasitas operasional akan sulit berkembang tanpa dukungan publik yang berkelanjutan. Dengan kerangka inilah penelitian ini menganalisis secara mendalam strategi penerapan *good governance* di Desa Cibodas agar kebijakan pengelolaan Dana Desa dapat berjalan optimal, transparan, dan berdaya guna.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, karena tujuan utamanya adalah memahami secara mendalam bagaimana strategi penerapan *good governance* dalam pengelolaan Dana Desa dilaksanakan di Desa

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 15 Okt 2025**Published : 24 Okt 2025*

Cibodas Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Sejalan dengan pendapat Moleong (2021), pendekatan kualitatif cocok digunakan untuk mengkaji fenomena sosial yang menuntut pemahaman terhadap proses, interaksi, dan makna yang dibangun oleh pelaku kebijakan.

Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Cibodas Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, yang dipilih secara purposif karena desa ini memiliki potensi ekonomi dan sosial yang besar namun menghadapi tantangan dalam pelaksanaan tata kelola Dana Desa yang baik. Informan penelitian meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perwakilan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), tokoh masyarakat, dan kelompok penerima manfaat Dana Desa. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, yakni berdasarkan keterlibatan langsung mereka dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program Dana Desa. Data penelitian dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi penting sesuai fokus penelitian, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif dan matriks tematik, sedangkan verifikasi dilakukan dengan membandingkan data lapangan antar informan dan dokumen resmi untuk memastikan validitas temuan.

Untuk menjamin keabsahan data (validitas dan reliabilitas), penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai pihak (aparatur desa, BPD, dan masyarakat), sementara triangulasi metode dilakukan dengan menggabungkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Validitas temuan juga diperkuat dengan melakukan member check kepada informan kunci guna memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan fakta lapangan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan gambaran empirik yang komprehensif mengenai bagaimana

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 15 Okt 2025**Published : 24 Okt 2025*

---

penerapan prinsip-prinsip good governance melalui kerangka Strategic Triangle dapat memperkuat tata kelola Dana Desa di Desa Cibodas.

## **PEMBAHASAN**

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan Dana Desa di Desa Cibodas Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat berjalan dalam kerangka regulasi nasional yang menekankan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Sejak peluncuran Dana Desa tahun 2015, pemerintah desa dituntut untuk tidak hanya menyalurkan dana secara administratif, tetapi juga memastikan efektivitas dan keberlanjutannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung Barat tahun 2024, Desa Cibodas menerima Dana Desa sebesar Rp1,28 miliar yang dialokasikan untuk pembangunan fisik, pemberdayaan ekonomi, dan penanggulangan kemiskinan berbasis komunitas. Namun demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan dana tersebut sangat bergantung pada kemampuan aparatur desa dalam menerapkan prinsip good governance yang efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa dan perangkatnya, terdapat peningkatan kualitas tata kelola keuangan desa dalam lima tahun terakhir. Hal ini ditunjukkan dengan adanya sistem pelaporan berbasis aplikasi Siskeudes serta penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang lebih partisipatif. Namun, sejumlah tantangan masih muncul, seperti keterbatasan kapasitas SDM, rendahnya partisipasi warga dalam musyawarah perencanaan pembangunan, dan keterlambatan pelaporan keuangan akibat kendala teknis. Fenomena ini menggambarkan bahwa keberhasilan good governance tidak hanya ditentukan oleh regulasi formal, tetapi juga oleh efektivitas implementasi dan keselarasan antara visi pemerintah desa dan kebutuhan masyarakat.

Data BPS Kabupaten Bandung Barat (2024) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan pemerintahan meningkat sebesar 14% dalam dua tahun

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 15 Okt 2025**Published : 24 Okt 2025*

---

terakhir, namun tingkat literasi anggaran masih rendah. Hal ini menyebabkan kesenjangan informasi antara pengelola program dan warga penerima manfaat. Pemerintah Desa Cibodas berupaya mengatasi hal tersebut dengan melakukan sosialisasi keuangan publik melalui papan informasi desa dan forum musyawarah. Meskipun upaya ini menunjukkan kemajuan, transparansi informasi masih belum sepenuhnya berjalan terbuka karena keterbatasan media komunikasi dan pemahaman masyarakat. Dalam konteks Desa Cibodas, penelitian menemukan bahwa penciptaan nilai publik sudah mulai tampak, namun kapasitas operasional dan legitimasi sosial masih perlu ditingkatkan agar tata kelola Dana Desa lebih optimal.

#### 1) Dimensi *Public Value* (Nilai Publik)

Dimensi *public value* berkaitan dengan sejauh mana kebijakan publik menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, nilai publik dari pengelolaan Dana Desa di Desa Cibodas diwujudkan melalui pelaksanaan program pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Misalnya, pembangunan infrastruktur jalan desa, sarana air bersih, dan bantuan ekonomi produktif kepada kelompok usaha mikro terbukti meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar. Sebagian besar warga yang diwawancarai menyatakan bahwa program fisik tersebut telah memberikan manfaat langsung terhadap peningkatan mobilitas dan produktivitas ekonomi mereka.

Namun, meskipun manfaatnya nyata, proses perencanaan masih menghadapi kendala dalam hal partisipasi dan keterbukaan informasi. Beberapa responden masyarakat mengaku tidak mengetahui secara rinci alokasi dana per program karena informasi yang tersedia di papan publik tidak selalu diperbarui. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun nilai publik dihasilkan dari kegiatan pembangunan, masih terdapat ruang perbaikan dalam aspek transparansi dan komunikasi publik. Prinsip *good governance* menuntut agar pemerintah desa

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 15 Okt 2025**Published : 24 Okt 2025*

---

tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga memastikan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Pemerintah Desa Cibodas telah mencoba mengadopsi pendekatan berbasis kebutuhan masyarakat (*need-based approach*) dalam penyusunan RKPDes. Pendekatan ini didukung oleh forum musyawarah desa (*musdes*) yang terbuka, meskipun tingkat kehadiran masyarakat masih berkisar 50–60% dari undangan yang disebar. Keterlibatan kelompok perempuan dan pemuda juga masih terbatas, padahal kelompok ini merupakan aktor penting dalam pengawasan sosial terhadap pengelolaan Dana Desa. Oleh karena itu, meskipun arah kebijakan sudah mengarah pada peningkatan nilai publik, efektivitasnya masih perlu diperkuat melalui pendidikan politik warga dan peningkatan akses informasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *public value* di Desa Cibodas sudah mulai terbentuk melalui program pembangunan yang berdampak nyata, namun masih perlu diperluas dengan partisipasi aktif masyarakat dan peningkatan transparansi anggaran. Nilai publik akan semakin kuat apabila seluruh proses pengelolaan Dana Desa dijalankan dengan prinsip kolaboratif dan berorientasi pada keberlanjutan manfaat sosial.

## 2) Dimensi *Operational Capacity* (Kapasitas Operasional)

Kapasitas operasional menjadi faktor krusial dalam menentukan efektivitas penerapan *good governance*. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan perangkat desa, ditemukan bahwa salah satu kendala utama dalam pengelolaan Dana Desa adalah keterbatasan kompetensi aparatur desa, terutama dalam hal perencanaan anggaran dan pelaporan keuangan. Beberapa staf pelaksana mengakui bahwa mereka masih mengandalkan pendamping desa dalam menafsirkan regulasi teknis dan menggunakan aplikasi keuangan seperti

*Received : 22 Sept 2025*

*Accepted : 15 Okt 2025*

*Published : 24 Okt 2025*

---

Siskeudes. Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian operasional belum sepenuhnya terbentuk.

Selain itu, kapasitas operasional juga dipengaruhi oleh ketersediaan sarana pendukung seperti perangkat komputer, jaringan internet, dan sistem dokumentasi digital. Berdasarkan hasil penelitian, fasilitas yang tersedia di kantor desa relatif memadai, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung transparansi publik. Misalnya, laman resmi desa belum aktif digunakan sebagai media pelaporan keuangan atau publikasi kegiatan pembangunan, sehingga akses informasi masyarakat masih terbatas pada media manual seperti papan pengumuman dan rapat warga.

Keterbatasan kapasitas operasional juga terlihat pada lemahnya koordinasi antar lembaga desa, seperti antara pemerintah desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan. Proses pengawasan internal belum berjalan maksimal karena kurangnya pelatihan teknis bagi anggota BPD dalam membaca laporan keuangan dan mengevaluasi hasil pembangunan. Akibatnya, fungsi check and balance dalam tata kelola desa menjadi kurang efektif.

Namun, di sisi lain, terdapat inisiatif positif berupa peningkatan pelatihan bagi aparatur melalui program DPMD Kabupaten Bandung Barat. Dalam dua tahun terakhir, sejumlah perangkat desa telah mengikuti pelatihan administrasi keuangan dan penguatan kapasitas kelembagaan desa. Dampaknya, terjadi peningkatan ketepatan waktu pelaporan Dana Desa sebesar 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa investasi dalam pengembangan kapasitas SDM mulai menghasilkan dampak positif terhadap efisiensi birokrasi.

Dengan merujuk pada teori *Strategic Triangle*, kapasitas operasional yang kuat merupakan prasyarat bagi penciptaan nilai publik dan legitimasi kebijakan. Oleh karena itu, upaya peningkatan kapasitas aparatur desa harus

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 15 Okt 2025**Published : 24 Okt 2025*

terus dilakukan secara sistematis melalui pelatihan, sertifikasi, dan mekanisme evaluasi kinerja yang berbasis indikator terukur.

### 3) Dimensi *Legitimacy and Support* (Legitimasi dan Dukungan)

Dimensi terakhir dari *Strategic Triangle* adalah *legitimacy and support*, yang menggambarkan sejauh mana kebijakan publik memperoleh dukungan sosial dan politik dari masyarakat serta pihak eksternal. Berdasarkan hasil penelitian, legitimasi pemerintah Desa Cibodas dalam mengelola Dana Desa relatif baik, tercermin dari meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat desa. Hal ini terlihat dari hasil survei persepsi publik yang dilakukan peneliti, di mana 72% responden menilai pemerintah desa cukup transparan dalam pengelolaan anggaran.

Namun, legitimasi ini belum sepenuhnya stabil karena sebagian warga masih menilai adanya bias dalam penentuan penerima manfaat program bantuan langsung tunai (BLT-DD). Kelemahan dalam mekanisme seleksi ini menimbulkan persepsi ketidakadilan dan berpotensi mengurangi dukungan sosial terhadap kebijakan pemerintah desa. Oleh sebab itu, peningkatan transparansi dan pelibatan masyarakat dalam proses verifikasi penerima manfaat menjadi langkah penting untuk menjaga legitimasi kebijakan.

Dukungan eksternal dari pemerintah daerah dan lembaga pendamping juga berperan signifikan dalam memperkuat legitimasi. DPMD Kabupaten Bandung Barat secara rutin memberikan asistensi teknis dan supervisi terhadap laporan realisasi Dana Desa, serta mendorong penerapan sistem pengawasan berbasis digital. Kolaborasi ini telah membantu meningkatkan kredibilitas pemerintah desa dalam pelaporan keuangan dan memperkecil potensi penyimpangan.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 15 Okt 2025**Published : 24 Okt 2025*

---

Selain dukungan kelembagaan, faktor kepemimpinan kepala desa juga berpengaruh besar terhadap legitimasi publik. Berdasarkan wawancara, Kepala Desa Cibodas dikenal memiliki gaya kepemimpinan partisipatif yang terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat. Sikap ini memperkuat hubungan emosional antara pemerintah desa dan warga, sehingga memunculkan rasa kepemilikan (*sense of belonging*) terhadap program pembangunan. Dengan demikian, dukungan sosial yang kuat menjadi modal penting bagi keberlanjutan kebijakan *good governance*.

Secara keseluruhan, legitimasi dan dukungan di Desa Cibodas telah tumbuh melalui komunikasi publik yang terbuka dan kerja sama dengan berbagai pihak. Namun, penguatan kelembagaan dan pembenahan sistem partisipasi masih diperlukan agar kepercayaan publik dapat terjaga secara berkelanjutan.

## **KESIMPULAN**

Pelaksanaan *good governance* dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Cibodas Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan desa telah bergerak ke arah yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif, meskipun masih menghadapi berbagai keterbatasan struktural dan kapasitas sumber daya. Berdasarkan hasil analisis menggunakan pendekatan *Strategic Triangle* Mark Moore, dapat disimpulkan bahwa strategi penerapan *good governance* di Desa Cibodas telah menghasilkan kemajuan nyata dalam menciptakan nilai publik (*public value*), meningkatkan kapasitas operasional (*operational capacity*), serta memperkuat legitimasi dan dukungan masyarakat (*legitimacy and support*).

*Pertama*, dari sisi *public value*, kebijakan pengelolaan Dana Desa telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi produktif, dan peningkatan akses terhadap layanan sosial. Namun, tantangan masih muncul pada aspek transparansi informasi dan keterlibatan masyarakat yang belum merata di seluruh kelompok sosial.

*Received : 22 Sept 2025*

*Accepted : 15 Okt 2025*

*Published : 24 Okt 2025*

---

Hal ini menandakan bahwa nilai publik telah terbentuk, tetapi belum sepenuhnya optimal karena belum terinstitusionalisasi dalam sistem partisipasi yang berkelanjutan.

*Kedua*, dalam dimensi *operational capacity*, pemerintah desa menunjukkan komitmen kuat untuk memperkuat kapasitas birokrasi dan administrasi keuangan melalui pelatihan, penggunaan aplikasi digital seperti Siskeudes, serta peningkatan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Barat. Meskipun masih terdapat kendala berupa keterbatasan SDM dan sarana teknologi, upaya peningkatan kapasitas yang dilakukan telah menghasilkan peningkatan efisiensi dalam pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan.

*Ketiga*, dalam dimensi *legitimacy and support*, pemerintah desa berhasil membangun kepercayaan publik melalui gaya kepemimpinan partisipatif, transparansi dalam proses musyawarah, dan keterlibatan lembaga eksternal seperti BPD dan DPMD. Namun, legitimasi sosial tersebut masih bersifat fluktuatif karena sebagian masyarakat menilai adanya ketimpangan dalam penyaluran bantuan langsung tunai dan keterbatasan akses terhadap informasi keuangan.

Secara keseluruhan, penerapan *good governance* di Desa Cibodas telah menunjukkan efektivitas yang cukup tinggi, namun keberlanjutannya bergantung pada penguatan sistem partisipasi publik, peningkatan kapasitas aparatur, dan pelembagaan transparansi berbasis teknologi digital. Temuan ini menguatkan pandangan Moore bahwa keberhasilan kebijakan publik ditentukan oleh keseimbangan antara penciptaan nilai publik, kemampuan operasional, dan legitimasi sosial yang berkelanjutan.

## **SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis di atas, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk memperkuat penerapan *good governance* dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Cibodas. *Pertama*, perlu dilakukan institusionalisasi partisipasi masyarakat melalui mekanisme yang lebih inklusif, seperti forum konsultasi publik

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 15 Okt 2025**Published : 24 Okt 2025*

---

berkala, melibatkan kelompok perempuan dan pemuda dalam perencanaan pembangunan, serta sistem aspirasi digital yang memudahkan warga menyampaikan usulan dan pengaduan. *Kedua*, pemerintah desa perlu meningkatkan kapasitas teknis aparatur melalui pelatihan keuangan, manajemen proyek, dan teknologi informasi agar mampu menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan keuangan secara mandiri. Program pendampingan yang difasilitasi oleh DPMD dan perguruan tinggi dapat menjadi strategi berkelanjutan untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia. *Ketiga*, diperlukan penguatan sistem transparansi berbasis digital dengan memanfaatkan laman resmi desa dan media sosial sebagai sarana publikasi keuangan dan pelaporan kinerja pembangunan. Dengan digitalisasi informasi, masyarakat dapat mengakses data Dana Desa secara cepat dan mudah, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. *Keempat*, perlu dilakukan reformulasi kebijakan pengawasan agar Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kapasitas yang lebih kuat dalam menjalankan fungsi kontrol dan evaluasi terhadap penggunaan Dana Desa. Pelatihan audit sosial dan literasi anggaran bagi anggota BPD dapat memperkuat mekanisme check and balance di tingkat desa.

## **REFERENSI**

- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Disbudparpora Kota Cimahi. (2024). *Laporan kinerja dan data pariwisata Kota Cimahi 2023–2024*. Cimahi: Pemerintah Kota Cimahi.
- Kotler, P., Haider, D., & Rein, I. (2020). *Marketing places: Attracting investment, industry, and tourism to cities, states, and nations*. New York: Free Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.
- Siringoringo, H. (2005). *Optimalisasi kebijakan publik: Pendekatan strategi dan sumber daya*. Jakarta: Rineka Cipta.

*Received : 22 Sept 2025*

*Accepted : 15 Okt 2025*

*Published : 24 Okt 2025*

---

Wibowo, A., & Sari, D. (2023). City branding and local tourism competitiveness in Indonesian urban areas. *Journal of Regional Development Studies*, 11(2), 120–136. <https://doi.org/10.23960/jrds.v11i2.2023>

Yuliani, T., & Rahmawati, N. (2021). Evaluating local government branding strategies for sustainable tourism. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia*, 8(1), 45–63. <https://doi.org/10.24198/jipi.v8i1.2021>